



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-10.KP.03.03.TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
DARI DAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu melakukan pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
6. Direktur Jenderal Imigrasi;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang bersangkutan;
8. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM;
9. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-10.KP.03.03 TAHUN 2019

TANGGAL : 20 FEBRUARI 2019

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. PRIYADI, Bc.IP., M.Si. NIP. 196308111987031001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan	Eselon II.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 3.250.000,00
2.	Drs. IMAM SUYUDI, Bc.IP., S.H., M.H. NIP. 196312071987031001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten	sda.
3.	SUTRISMAN, Bc.IP., S.H. NIP. 196004021983031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah	sda.
4.	DEWA PUTU GEDE, Bc.IP., S.H., M.H. NIP. 195910031984031001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara	sda.
5.	Drs. LIBERTI SITINJAK, M.M., M.Si. NIP. 196407011991031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat	sda.
6.	Drs. IBNU CHULDUN, Bc.IP., S.H., M.Si. NIP. 196603281988111001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	sda.
7.	Drs. HARUN SULIANTO, Bc.IP., S.H. NIP. 196504081987031002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat	sda.
8.	YUNAEDI, Bc.IP., S.H., M.H. NIP. 196006071986031003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	sda.
9.	Drs. ANAS SAEFUL ANWAR, Bc.IP., M.Si. NIP. 196202191986031002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	sda.

1	2	3	4	5	6
10.	HENI YUWONO, Bc.IP., S.Sos., M.Si. NIP. 196506051988111001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah	Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan	Eselon II.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 3.250.000,00
11.	Drs. MARASIDIN, Bc.IP., M.H. NIP. 196404251990011001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan	Kepala Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah	Eselon II.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 2.025.000,00
12.	TAUFIQURAKHMAN, S.Sos., S.H., M.Si. NIP. 196811181991031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten	Kepala Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan	sda.
13.	SLAMET PRIHANTARA, Bc.IP., S.H., M.H. NIP. 196403011987031003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali	Kepala Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten	sda.
14.	SUDJONGGO, Bc.I.P., S.H. NIP. 196311241988111001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung	Kepala Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali	sda.
15.	Drs. SYAFAR PUDJI ROCHMADI, Bc.IP., S.H., M.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo	Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung	sda.
16.	R. ANDIKA DWI PRASETYA, Bc.I.P., S.Pd. NIP. 196712171991031002	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang	Kepala Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta	sda.
17.	HENDRA EKAPUTRA, A.Md.I.P., S.H., M.H. NIP. 197212241999021001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Batu Nusakambangan	Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang	sda.
18.	ERWEDI SUPRIYATNO, Bc.IP., S.H., M.H. NIP. 196908231992031001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu	Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Batu Nusakambangan	sda.

1	2	3	4	5	6
19.	PUJO HARINTO, Bc.IP., S.Sos., M.Si. NIP. 196703311990011001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur	Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu	Eselon II.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 2.025.000,00



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY